

 KEMENTERIAN PERTANIAN	Nomor SOP	078/SOP/BRMP Bengkulu/2026
	Tanggal Pembuatan	09 Februari 2026
	Tanggal Revisi	-
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU	Tanggal Efektif	19 Februari 2026
	Disahkan Oleh	Kepala Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu  Dr. Shannora Yuliasari, S.TP., MP NIP. 19740731 200312 2 001
	Nama SOP	PENGAJUAN KEBERATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 • Perpres No 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian • Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik • Permentan No. 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementan • Permentan No 51/permentan/TI.110/11/206 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Pertanian • Permentan No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BRMP • Kepmentan No. 649 Tahun 2-25 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian. • Permentan No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian • Kepmentan No. 649 Tahun 2-25 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian. • Surat Pengesahan DIPA BRMP Bengkulu, Nomor : SP DIPA- 018.09.2.633996/2026	• Memahami peraturan terkait keterbukaan informasi publik • Memiliki keahlian komputer tingkat sedang • Memiliki kemampuan berkomunikasi dan berkoordinasi dengan baik
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
• SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik • SOP Permintaan Informasi Publik • SOP Daftar Informasi Publik • SOP Pendokumentasian Informasi Publik	• Formulir Keberatan Layanan Publik • Perangkat Keras (<i>Hardware</i>): Laptop, Printer, • Alat Tulis Kantor
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Jika SOP ini tidak berjalan SOP maka pelayanan prima tidak akan tercapai	• Laporan Berkala
	

KEMENTERIAN PERTANIAN			
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN	Nomor	:	078/SOP/BRMP Bengkulu/2026
Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Bengkulu	Tanggal Penetapan	:	Februari 2026
Bagian Layanan Penerapan Modernisasi Pertanian	Tanggal Revisi	:	-
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi			
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENGAJUAN KEBERATAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK SATUAN KERJA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU			
Pengertian	:	Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik	
Tujuan	:	Sebagai acuan agar dalam menyusun, memutakhirkan dan menetapkan Daftar Informasi Publik dapat dilakukan secara mudah, tepat, cepat, dan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dan eraturan KomisiInformasi	
Kebijakan/Dasar Hukum	:	• UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik • PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 • Perpres No 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian • Permen PAN RB No. 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik • Permentan No. 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementan • Permentan No 51/permentan/TI.110/11/206 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Pertanian • Permentan No. 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT lingkup BRMP • Kepmentan No. 649 Tahun 2-25 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian. • Permentan No 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian • Kepmentan No. 649 Tahun 2-25 Tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian. • Surat Pengesahan DIPA BRMP Bengkulu, Nomor : SP DIPA- 018.09.2.633996/2026	
Prosedur	:	• Pengumpulan Informasi • Pengidentifikasi Informasi • Pengklasifikasian Informasi • Penetapan Daftar Informasi Publik	
Keterkaitan	:	• SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik • SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik • SOP Daftar Informasi Publik • SOP Pendokumentasian Informasi Publik	

BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN BENGKULU
TIM LAYANAN PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PEMOHON (PERORANGAN/ BADAN PUBLIK/BADAN HUKUM/ KELOMPOK)	PETUGAS/ STAF PENGGUNG JAWAB	KAPOKSI PPK	KEPALA BALAI BESAR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengajukan keberatan atas permohonan informasi publik melalui konter layanan informasi atau surat dengan melampirkan syarat yang telah ditentukan melalui petugas/staf penanggungjawab					Lampiran persyaratan keberatan	1 Hari	Lampiran persyaratan keberatan, Form 6	
2	Mempelajari keberatan permohonan informasi publik dan meneliti syarat-syarat administrasinya serta membukukan					Berkas keberatan permohonan informasi publik	1 Hari	Isian Form.6	
3	Mempelajari keberatan permohonan informasi publik. Menyiapkan jawaban atas keberatan informasi publik secara berjenjang ke Atasan PPID Utama						1 Hari	Konsep surat jawaban keberatan permohonan informasi publik	
4	Memberikan arahan atas jawaban untuk keberatan permohonan informasi publik					Konsep surat jawaban keberatan permohonan informasi publik	2 Hari	Konsep surat jawaban keberatan permohonan informasi publik	
5	Hasil arahan terhadap jawaban keberatan permohonan informasi publik kemudian diserahkan dan diselesaikan secara berjenjang					Surat jawaban keberatan permohonan informasi publik	1 Hari		
6	Penyampaian surat jawaban keberatan permohonan informasi publik					Surat jawaban keberatan permohonan informasi publik			